

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KOTA SUKABUMI**

***THE ROLE OF SOCIAL AGENCIES IN POVERTY ALLEVIATION  
IN SUKABUMI***

**Muslim Sabarisman**

Peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI  
Jalan. Dewi Sartika Nomor 200 Cawang III Jakarta Timur  
**E-mail:** Sleem.ndr@gmail.com

Diterima: 19 Maret 2015; Direvisi: 4 Juni 2015; Disetujui: 13 Juli 2015

**Abstrak**

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang ada Kota Sukabumi yang menjadi sasaran program dinas sosial. Program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan, namun demikian belum ada data yang dapat menjelaskan sejauh mana efektivitas program tersebut. Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan mengetahui peran dinas sosial Sukabumi dalam penanggulangan kemiskinan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi dikumpulkan melalui hasil wawancara terstruktur, studi dokumentasi terhadap hasil penelitian terdahulu, laporan-laporan dan literatur yang relevan, dan observasi. Sebagai informan, yaitu petugas dinas sosial dan instansi sektoral terkait. Hasil penelitian membuktikan, bahwa peran dinas sosial Sukabumi dalam penanggulangan kemiskinan belum mencapai tujuan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, anggaran yang belum mendukung, koordinasi masih lemah, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan program masih terbatas. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada dinas sosial untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas program dengan instansi terkait di daerah, meningkatkan intensitas konsultasi dengan instansi sosial provinsi dan pusat.

**Kata kunci:** dinas sosial, penanggulangan kemiskinan, sinergitas program.

**Abstrack**

*Poverty is one among social problems in Sukabumi that targeted as social service in those Social Agency. Poverty reduction programme has been implemented, however, there is no data that can explain the extent to which the effectiveness of the program. Regarding those problems, then the research was conducted with the purpose of knowing the role of social service of Sukabumi in poverty reduction. The method that used is descriptive qualitative approach. The data and information gathered through structured interviews, documentary study of previous research results, reports and relevant literature, and observations. As an informant consists of social service officers and related sectoral agencies. The research results found out that the role of the social Office of Sukabumi in poverty reduction has not optimally reached the goal yet. This is due to the still limited number of and quality of human resources, the limitation of its budget, lack of coordination and also limitation of required infrastructure. Based on the research results, it is recommended to the social Office to strengthen coordination and synergy program with relevant agencies in the region, increase the intensity of the consultations with the social province agency and the central social institutions.*

**Keywords:** social agencies, poverty reduction, the program synergism.

## PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial, dan khususnya penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara Pusat dengan Pemerintah Daerah. Kemiskinan merupakan program prioritas nasional, dan karenanya memerlukan pemahaman dan komitmen yang sama pada semua jajaran pemerintah. Pemahaman dan komitmen yang sama itulah tentu akan dapat mempercepat pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan di Kota Sukabumi merupakan salah satu permasalahan sosial yang menuntut perhatian pemerintah Kota Sukabumi. Berdasarkan data tahun 2012 di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi, penduduk miskin di Kota Sukabumi berjumlah 8.145 kepala keluarga. Dibandingkan dengan permasalahan sosial yang lain, masalah kemiskinan ini merupakan permasalahan sosial yang paling menonjol. Selain populasinya yang menonjol, kemiskinan ini telah melahirkan permasalahan sosial baru, seperti ketelantaran anak, dan tidak optimalnya pengasuhan anak oleh keluarga.

Kemiskinan di Kota Sukabumi menuntut kehadiran pemerintah, terutama Dinas Sosial Kota Sukabumi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu tugas dan fungsi dinas sosial adalah menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, dan salah satunya adalah pengurangan kemiskinan. Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sosial tersebut memerlukan dukungan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran (APBD) dan manajerial. Berbagai aspek tersebut apabila dapat dipenuhi, maka tujuan program dapat dicapai secara optimal, dan sebaliknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

dan kemudian menjadi dasar penyelenggaraan otonomi daerah bahwa salah satu urusan wajib yang dilaksanakan di daerah adalah urusan sosial, termasuk di dalamnya bidang kesejahteraan sosial. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah dengan kebutuhan obyektif masyarakat. Pada konteks sektor kesejahteraan sosial, agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat ditangani dengan cepat dan tuntas. Melalui kebijakan otonomi daerah, beban dan tugas-tugas pemerintah pusat yang tidak perlu, dapat dikerjakan oleh pemerintah daerah. Hal dapat dilihat dari tujuan otonomi daerah, yaitu (1) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, (2) pengembangan kehidupan demokrasi, (3) keadilan sosial, (4) pemerataan, (5) pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka keutuhan NKRI, (6) mendorong untuk memberdayakan masyarakat dan (7) menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (see Suradi, 2011).

Tujuan otonomi daerah tersebut memang belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana yang diharapkan. Berbagai hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Pusat kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM), dan informasi yang dilansir media massa, bahwa menyelenggarakan otonomi daerah masih menghadapi masalah besar. Permasalahan sosial silih berganti terjadi di daerah, dan paling menyolok adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah. Kemudian, selain permasalahan hukum tersebut otonomi daerah masih diwarnai dengan terbatasnya daya dukung daerah di bidang kesejahteraan sosial, terutama berkaitan dengan sumber daya manusia, dana dari APBD dan sarana prasarana.

Hal ini semakin menguatkan, bahwa peran daerah dalam kaitannya dengan penyediaan pelayanan kepada masyarakat masih jauh dari yang diharapkan (Suradi, 2011).

Pada era otonomi daerah ini, pemerintah daerah telah mendapatkan penguatan program dari pusat. Pada penanggulangan kemiskinan, melalui dana dekonsentrasi Kementerian Sosial telah mendistribusikan program dan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan. Melalui penguatan program dan anggaran ini diharapkan kinerja pemerintah daerah akan lebih optimal. Penduduk miskin dapat diturunkan populasinya dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, program yang didistribusikan dari pusat sifatnya pendukung dan tidak mengambil peranan lebih besar. Daerahlah yang mestinya memiliki alokasi yang lebih besar dalam program penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana dikemukakan oleh Dwiyanto, et all (2003), sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka masalah penanggulangan kemiskinan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah pusat. Dengan kata lain, upaya menanggulangi masalah kemiskinan sudah menjadi isu regional, yakni tergantung intervensi pemerintah daerah. Isu kemiskinan harus menjadi agenda pokok bagi pemerintah daerah. Maka untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari Pemda yang di tunjang dengan kapasitas yang memadai untuk menyelenggarakan program-program yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan menjadi isu yang strategis dan wajib untuk didiskusikan serta perlu untuk dibahas secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai peran Dinas Sosial Kota Sukabumi dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanggulangan kemiskinan. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai

bahan peningkatan peran dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kota Sukabumi dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan informasi awal, di Dinas Sosial Kota Sukabumi masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam penanggulangan kemiskinan. Padahal, penanggulangan kemiskinan merupakan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Sosial, dan urusan sosial merupakan urusan wajib di era otonomi daerah. Informan penelitian, yaitu petugas dinas sosial dan instansi sektoral di Kota Sukabumi. Data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, studi dokumentasi dengan mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya, laporan-laporan dan literatur yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Kota Sukabumi**

Secara geografis Kota Sukabumi terletak diantara pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek dan Bandung Raya. Jarak dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) ± 92 Km dan Jarak dari Ibukota Negara (Jakarta) ± 120 Km. Cukup dekatnya jarak membuat tingginya pergerakan orang dan barang dari kota-kota tersebut. Luas Wilayah Kota Sukabumi adalah ± 48 Km<sup>2</sup> dengan jarak terjauh dari Utara ke Selatan ± 7,5 Km dan dari Barat ke Timur ± 6 Km yang terdiri dari 7 Kecamatan, 33 Kelurahan, 355 Rukun Warga (RW) dan 1.533 Rukun Tetangga (RT).

Secara topografi Kota Sukabumi merupakan dataran tinggi yang memiliki luas lahan pertanian sebesar 1.751 Ha dari seluruh wilayah. Namun demikian luas lahan pertanian

ini terus menurun dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan fenomena yang terjadi di daerah perkotaan yaitu cepatnya perubahan fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain sebagai akibat banyaknya pembangunan di bidang perumahan, perdagangan, dan industri sehingga berdampak pada menyempitnya luas tanah pertanian. Secara administratif Kota Sukabumi terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Cikole, Cibereum, Citamiang, Lembursitu, Warudoyong, Baros, dan Gunung Puyuh yang terdiri dari 33 kelurahan.

Dilihat dari kondisi kependudukan masyarakat Kota Sukabumi pada saat ini jumlah penduduk miskin dan keluarga miskin di Kota Sukabumi tergolong masih cukup tinggi, kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan dua puluh tahun yang akan datang. Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan masalah kemiskinan di Kota Sukabumi menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dengan kemiskinan yang berbeda. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

## **2. Permasalahan Kemiskinan**

Kemiskinan mempunyai permasalahan yang kompleks, mulai dari akar permasalahannya maupun kebijakan yang diambil untuk mengatasinya. Kemiskinan di Kota Sukabumi merupakan fenomena sosial yang bersifat multidimensional, karena meliputi rendahnya tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan, kerawanan tempat tinggal dan pribadi, dan

ketidakberdayaan. Hal tersebut mengakibatkan penduduk miskin tinggal di pemukiman tidak layak huni, mengalami kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan dasar dan kesempatan kerja. Kondisi ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Roebyantho, et all (2011), bahwa umumnya kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan (lingkup dimensi ekonomi) dan memenuhi kebutuhan dari aspek sosial, lingkungan, keberdayaan dan tingkat partisipasinya (lingkup dimensi non ekonomi). Mereka juga mempunyai pandangan dan ukuran sendiri tentang kesejahteraan sosial, sehingga perlu campur tangan pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam melakukan pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan beberapa kajian, bahwa terjadinya kemiskinan dan masalah sosial dikarenakan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial dan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Kemudian faktor eksternal yaitu: kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin; tidak tersedianya pelayanan sosial dasar; tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial, serta dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis. Sebagaimana dikemukakan oleh Suradi, dkk (2012), bahwa kemiskinan dan kebutuhan dasar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Secara umum kemiskinan banyak dipahami sebagai ketidakmampuan

orang/keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebanyakan orang miskin tidak dapat menikmati makanan sehat, tidak mampu membeli kebutuhan sandang, menempati rumah yang tidak layak huni, tidak dapat menjangkau akses pelayanan kesehatan dan rendahnya partisipasi dalam pendidikan.

Penduduk miskin yang tidak berdaya dalam menghadapi masalah internal dan eksternal, menyebabkan penanganannya menjadi semakin sulit. Kondisi kemiskinan dan masalah sosial yang berlarut-larut berisiko menjadi kemiskinan budaya (*culture poverty*), tidak ada kemauan/pasrah/patah semangat (*fatalistik*) dan dalam keadaan situasi kritis cenderung melakukan tindakan asosial, antisosial, perilaku destruktif atau terlibat dalam perilaku kriminal seperti pencurian, perdagangan ilegal narkoba, pelacuran, perdagangan manusia, dan sebagainya.

### 3. Peran Dinas Sosial

Permasalahan sosial yang terjadi di Kota Sukabumi semakin kompleks, dan terus berkembang. Kondisi ini menuntut Pemda Kota Sukabumi untuk memberikan prioritas terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini relevan dengan populasi dan kompleksitas permasalahan sosial yang ada di Kota Sukabumi yang cenderung mengalami peningkatan. Sebagaimana dikemukakan Kepala Dinas Sosial bahwa: “di Kota Sukabumi ini, jumlah penyandang masalah kebanyakan bukan warga Sukabumi, tetapi kebanyakan adalah sebagai pendatang, seperti penyandang masalah tuna wisma, gepeng, anak jalanan, pemulung dan WTS, yang banyak menempati atau tinggal di daerah yang kumuh. Namun demikian pemerintah melalui dinas sosial berupaya dalam menangani permasalahan PMKS, dengan melakukan berbagai koordinasi dengan SKPD yang terkait”. Dengan demikian sudah menjadi keharusan dan tanggung jawab SKPD,

khususnya Dinas Sosial untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Berbagai permasalahan sosial tersebut menuntut pemecahan yang terencana, sistematis dan berkelanjutan. Untuk itu, Dinas Sosial Kota Sukabumi memerlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas, SDM, anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan kebijakan dan regulasi, di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi Tahun 2009 – 2013, visi Pembangunan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi adalah: “Terwujudnya Pelayanan Berkualitas Bidang Sosial, Menuju Kota Sukabumi yang Cerdas, Sehat, dan Sejahtera”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) misi yang dilaksanakan 2008 – 2013, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Religius,
2. Mewujudkan pelayanan yang optimal dan berkualitas di Bidang Sosial,
3. Mewujudkan pengembangan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan Lembaga-lembaga lainnya,
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pekerja/Buruh dan Korban Bencana.
5. Mewujudkan Iklim Ketenagakerjaan yang kondusif, Pengembangan Perluasan Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha.
6. Mewujudkan Peningkatan Koordinasi dan Kerja sama antar Lembaga/Dinas/Instansi Daerah Provinsi dan Pusat.

Adapun tujuan untuk mewujudkan visi dan misi adalah:

1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam proses pelayanan.



2. Terwujudnya pelayanan yang optimal dan berkualitas di Bidang Sosial.
3. Terwujudnya pengembangan kemampuan PSKS, Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan, Organisasi-organisasi Pekerja dan Pengusaha serta Lembaga-lembaga lainnya.
4. Meningkatkan kesejahteraan PMKS, Pekerja/Buruh dan Korban Bencana.
5. Meningkatkan kualitas Tenaga Kerja dan berkembangnya peluang lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
6. Menciptakan iklim yang harmonis antar lintas sektoral.

Melihat visi, misi serta tujuan dari Dinas Sosial Kota Sukabumi tersebut, pada kenyataannya kurang didukung sumber daya manusia di bidang sosial. Pada saat ini di Dinas Sosial Kota Sukabumi terdapat 6 orang yang bekerja di Dinas Sosial, kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk bidang sosial, kualifikasi pendidikan kesejahteraan sosial yang belum ada, serta sarana dan prasarana Dinas Sosial yang tidak memadai. Kondisi Dinas Sosial Kota Sukabumi sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel: 1 Kondisi Dinas Sosial Sukabumi pada tahun 2013

No	Variabel	Uraian/Penjelasan
1	Tupoksi	1. Penanganan Masalah PMKS (Bidang Sosial) 2. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	Perbandingan Anggaran (di luar Belanja Pegawai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 55 persen untuk Bidang Penanganan PMKS</li> <li>◦ 45 persen untuk Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi</li> </ul>
3	Sumber Daya Manusia Bidang Penanganan PMKS	1. PNS Dinsosnakertran Bid. Sosial: 6 orang 2. TKSK: 6 orang dari 7 Kecamatan 3. PSM: 420 orang
4	Kualifikasi pendidikan Pekerjaan Sosial/ Kesejahteraan Sosial	
5	Level Keterpaduan antar SKPD dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Level Koordinasi
6	Jenis Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1. Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial RI: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KUBE Tahun 2011</li> <li>b. PKH Tahun 2013</li> </ul> 2. Program Kearifan Lokal: Bantuan Paket Lebaran untuk Lansia

Sumber: *Dinsosnakertrans Kota Sukabumi, 2013.*

Adapun peran dan upaya dari program pelayanan Dinas Sosial yang telah dilaksanakan adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 2: Jenis Kegiatan Pelayanan Sosial di Dinas Sosial Kota Sukabumi

No	Jenis Bidang Pelayanan	Kegiatan yang di lakukan
1	Kerjasama Bidang Sosial.	Penyelenggaraan kerjasama Bidang Sosial
2	Pembinaan Bidang Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Koordinasi/kerjasama Bidang Sosial.</li> <li>◦ Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang sosial</li> </ul>
3	Identifikasi dan Penanganan PMKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Identifikasi sasaran</li> <li>◦ Pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial</li> </ul>

4	Pengembangan dan Pendayagunaan PSKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Penggalian dan pendayagunaan PSKS</li> <li>◦ Pengembangan dan pendayagunaan PSKS</li> </ul>
5	Sarana dan Pra Sarana Sosial	Penyediaan sarana dan pra sarana sosial
6	Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Pemeliharaan TMP.</li> <li>◦ Penyiapan bahan kelengkapan usulan Penganugerahan</li> </ul>
7	Gelar Kepahlawanan Nasional dan Perintis Kemerdekaan	-
8	Penanggulangan Korban Bencana	-
9	Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Pemberian ijin pengumpulan uang atau barang</li> <li>◦ Pengendalian pengumpulan uang atau barang</li> </ul>
10	Undian	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Pemberian rekomendasi ijin undian.</li> <li>◦ Pengendalian dan pelaksanaan undian</li> </ul>
11	Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental	-
12	Lanjut Usia Terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu	-
13	Pengasuhan dan pengangkatan anak	Pemberian rekomondasi pengangkatan anak

Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi, 2013

Mencermati data pada tabel 2, bahwa program penanggulangan kemiskinan tidak menjadi program prioritas pada Dinas Sosial Kota Sukabumi. Hasil wawancara dengan informan (staf Dinsos, Dinkes, Diknas, Disdukcapil, staf kantor wali kota, dan Dinas Tenaga Kerja yang ada di kota Sukabumi), diperoleh informasi bahwa program-program pemerintah yang ada di Kota Sukabumi hampir setiap SKPD melaksanakan kegiatannya berkaitan dengan permasalahan kemiskinan. Sedangkan penanganan permasalahan PMKS yang secara khusus hanya dibebankan pada Dinas Sosial saja. SKPD yang terkait dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial hanya sebatas koordinasi saja.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, bahwa Dinas Sosial kota Sukabumi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah di bidang sosial belum maksimal. Hal ini dapat dilihat masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Sosial, SDM yang

sangat minim. Masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami program-program pelayanan dari pemerintah setempat. Akibatnya masyarakat tidak mengetahui atau tidak dapat mengakses pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan informasi lapangan, bahwa di Kota Sukabumi hampir setiap SKPD melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Sedangkan penanganan PMKS lain menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial. Meskipun demikian, sebagaimana dikemukakan informan, bahwa pelayanan bagi penyandang masalah sosial yang sifatnya *urgent* dan *emergency* masih kurang mendapat perhatian, sehingga penanganannya tidak sampai tuntas. Hal yang sama juga terjadi pada program penanggulangan kemiskinan. Dikarenakan program penanggulangan kemiskinan tersebar di beberapa SKPD, maka sulit untuk mengendalikan program dan mengukur capaian kerjanya. Terjadinya tumpang tindih pada pelaksanaan program tidak dapat dihindari lagi.

## Faktor yang Mempengaruhi

### 1. Kendala yang Dihadapi

Dilihat dari aspek hukum yang memayungi penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari minimnya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota yang mengatur secara khusus tentang penanggulangan kemiskinan. Selain itu dalam penanggulangan kemiskinan, setiap SKPD masih mengacu pada Permendagri Nomor 42 2010 tentang tugas dan fungsi Bappeda dan SK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di daerah. Rendahnya produk hukum dalam menanggulangi kemiskinan, mengakibatkan Pemda Sukabumi masih bergantung pada subsidi pemerintah pusat. Akibatnya, Pemda tidak mampu merespon permasalahan-permasalahan sosial dan kemiskinan.

Kendala berikutnya, tidak adanya sarana prasarana tempat penampungan/shelter bagi PMKS yang mendapat bantuan layanan. Kota Sukabumi belum memiliki panti pemerintah ataupun rumah singgah yang dapat menampung dan melayani permasalahan sosial. Kemudian SDM bidang sosial di Dinas Sosial kota Sukabumi jumlahnya sangat kurang. Pada saat ini hanya ada 12 orang, dan diantaranya 4 (empat) orang tahun 2014 akan memasuki masa pensiun. Sebagaimana dikemukakan oleh staf Dinas Sosial Kota Sukabumi:

*“kantor Dinas Sosial yang melayani publik ini, memiliki beberapa kelemahan yang dapat menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah: 1) Kurang memiliki SDM yang berpendidikan sarjana (S1) dan profesional dibidang kesejahteraan sosial, 2) Kurang memiliki SDM yang terampil dibidang komputerisasi dan pelayanan sosial, 3) Kurang memiliki tenaga-tenaga fungsional, baik sosial maupun ketenagakerjaan, 4) Sebagai suatu*

*Lembaga/SKPD yang baru, sarana dan prasarana Dinas yang belum memadai”.*

Kemudian demikian juga dikemukakan seorang warga masyarakat:

*“Ah...percuma wae Kang...dongkap ka kantor sosial atanapi ka puskesmas bade pangaduan sareng minta bantuan biaya kasehatan ka pamarentah mah...loba kaditu kadieu di oper-oper...kan kedah ngongkosan kanu angkot...terangkan abdi mah jalmi alit teu gaduh nanaon...jalmi miskin ( red: Ah...percuma saja Kang...datang ke kantor sosial atau ke puskesmas mau pengaduan dan minta bantuan biaya kesehatan ke pemerintah banyak kesana kesini di oper-oper...kan harus mengeluarkan ongkos buat angkot...tau kan saya orang kecil ngga punya apa-apa...orang miskin)”.*

Masyarakat beranggapan bahwa pemerintah belum bisa memberi melakukan penanggulangan kemiskinan dan menangani permasalahan sosial lainnya sampai tuntas. Masyarakat mengeluhkan banyaknya birokrasi sebagai rujukan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, padahal bantuan layanan yang diajukan masyarakat tersebut belum tentu diterima. Menurut masyarakat justru seringkali ditolak dan tidak pernah terselesaikan dengan baik/tidak tuntas.

Sumber daya manusia dibidang kesejahteraan sosial juga merupakan kendala yang dihadapi Dinas Sosial. Akibatnya, penanganan masalah kesejahteraan sosial masih terbatas dan hanya sebatas rujukan. Pelayanan yang dilaksanakan terkesan hanya memberikan saran dan mengantarkan klien saja. Tanpa tindakan atau tidak dapat memberikan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Berikutnya adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya, anggaran untuk program bidang kesejahteraan sosial masih dirasakan sebagai kendala penyelenggaraan



kesejahteraan sosial. Hampir semua SKPD yang menyelenggarakan pelayanan di bidang sosial anggarannya sangat terbatas dibandingkan dengan anggaran infrastruktur. Salah satu contoh, anggaran yang diberikan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kepada Dinsosnakertran dan Bencana Alam sebesar 1.187.429.000,- per tahun. Kemudian, anggaran sebesar itu dibagi tiga untuk Dinsos bidang sosial, kepada Disnakertran dan kemudian untuk sekretariat Dinsosnakertran. Terbatasnya anggaran ini tentu akan mempengaruhi pelayanan bagi PMKS dan program pelayanan kesejahteraan sosial lain.

Selain itu kendala-kendala tersebut, Dinas Sosial dihadapkan pada tantangan ke depan, yaitu: a) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan bidang Sosial, b) rendahnya keterampilan/skill para pencari kerja dan PMKS, c) meningkatnya angka pengangguran dan penyandang masalah sosial, d) terbatasnya lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja, e) rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tidak sebanding dengan tuntutan pasar kerja, dan f) tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi.

Ketersediaan data yang terpadu juga masih menjadi kendala mendasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya penanggulangan kemiskinan. Penyebabnya adalah masing-masing SKPD mempunyai data tersendiri. Tidak adanya data terpadu ini menyebabkan sering terjadi tumpang tindih mengenai jumlah data penerima program layanan. Pada saat ini, dalam penanggulangan kemiskinan, masih menggunakan data dari BPS dan PPLS tahun 2011. Bahkan masih ada SKPD yang menggunakan data tahun 2008 sebagai data dasar untuk program pelayanan kesehatan.

Kendala terakhir adalah sulitnya mengintegrasikan program. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik kepentingan pimpinan lembaga/instansi yang memberikan pelayanan sejenis, adanya budaya organisasi (*culture of organization*) yang tidak fokus pada penyelesaian pelayanan pemenuhan kebutuhan dan penanganan masalah PMKS/Klien. Kondisi ini ditambah dengan pergantian atau mutasi pejabat pemerintah daerah.

## 2. Faktor yang Mendukung

Penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial di Kota Sukabumi, didukung oleh potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan digali untuk dimanfaatkan. Beberapa potensi dan sumber dimaksud, yaitu:

- a. Sumber daya manusia. Penduduk yang berpendidikan sampai tingkat SLTA sebesar 25,38 persen, dan menamatkan sampai Perguruan Tinggi/Akademik sebesar 6,15 persen (BPS, Kota Sukabumi 2012). Kondisi ini merupakan keberhasilan Pemerintah Kota Sukabumi dalam bidang pendidikan serta peran serta masyarakat yang telah sadar akan pentingnya pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan membaca dan menulis masyarakat Kota Sukabumi pada Tahun 2012 tercatat sebesar 99,68 persen.
- b. Potensi alam untuk bertani, berkebun, dan empang ikan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian penduduk setempat. Pembangunan pertanian tanaman pangan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan dibidang ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini diupayakan melalui peningkatan produksi pangan baik kuantitas maupun kualitasnya.

- c. Potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada di Kota Sukabumi sebagai pilar-pilar partisipasi kesejahteraan sosial, antara lain: Organisasi sosial 22 buah, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Panti Asuhan Anak, Panti Jompo, kemudian adanya Loka Bina Karya (LBK) sebagai tempat pelayanan dan bimbingan sosial bagi penyandang masalah sosial. Adanya lembaga-lembaga latihan swasta sebanyak 23 buah, adanya Balai Latihan Kerja (swasta) 2 buah. Untuk potensi ketenagakerjaan seperti yang dikatakan kepala sub bagian bidang sosial bahwa: "Sebetulnya pemerintah Kota Sukabumi sudah menyiapkan calon tenaga kerja, namun belum terealisasi perekrutannya sampai saat ini, dan kemungkinan di tahun 2014 nanti akan dicoba untuk merealisasikannya, sehingga nantinya tenaga kerja bidang sosial ini menjadi potensi kedepan untuk pembangunan kesejahteraan sosial dan khususnya untuk menambah amunisi pekerja sosial profesional dalam melayani masyarakat yang membutuhkannya".
- d. Terdapat 415 perusahaan yang mampu menampung 10.469 tenaga kerja, yang nantinya bisa mengurangi pengangguran, dari perusahaan perusahaan itu juga terdapat organisasi-organisasi pekerja yang bisa dijadikan wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat, terutama mengenai permasalahan ketenagakerjaan. Kemudian yang terpenting selain potensi-potensi yang sudah disebutkan diatas, yaitu dengan adanya perangkat Peraturan PerUndang-undangan tentang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan, sebagai sumber acuan regulasi atau kebijakan yang dapat digunakan sebagai langkah-langkah kegiatan pemerintahan dalam melayani masyarakat, terutama program-program bidang kesejahteraan sosial.

Melihat potensi yang ada di Kota Sukabumi dikatan cukup memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemberian program-program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial yang ada. Pada kenyataannya implementasi kegiatan ataupun program-program yang dilakukan belum maksimal dan cenderung tidak berjalan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadikan peran Dinas Sosial kurang maksimal, diantaranya disebabkan oleh minimnya anggaran bidang kesejahteraan sosial, minimnya tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial yang duduk di Dinas Sosial Kota Sukabumi, kemudian sarana dan prasarana untuk rehabilitasi dan bimbingan serta keterampilan bagi penyandang permasalahan sosial, serta sarana dan prasarana penunjang kinerja kedinasan yang ada di Dinas Sosial yang tidak memadai.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Sukabumi dalam program penanggulangan kemiskinan belum optimal. Program penanggulangan kemiskinan belum menjadi prioritas Pemerintah Daerah, hal ini tentu mempengaruhi pelaksanaan program pada Dinas Sosial Kota Sukabumi. Belum optimalnya peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu terbatasnya sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran yang bersumber dari APBD.

## SARAN

Untuk peningkatan peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi, disarankan sebagai berikut:

1. Peningkatan intensitas sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Sosial dalam rangka memberikan pemahaman dan

mensosialisasikan secara intensif terkait penanggulangan kemiskinan serta permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, baik di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi. Dinas Sosial menjadi koordinator antar SKPD yang terkait dalam segala kegiatan dan program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya.

2. Peningkatan kerjasama serta koordinasi antar SKPD dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial, secara bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya dan dapat ditangani dengan tuntas, tentunya dengan komitmen yang tinggi dari pemangku kepentingan, yang sudah dibangun dan direncanakan untuk melaksanakan program penanganan kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial lainnya. Sehingga dibutuhkan integrasi, serta kerjasama antar SKPD dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rencana aksi pemberian pelayanan kesejahteraan sosial yang maksimal dan efektif kepada masyarakat Kota Sukabumi.
3. Peningkatan koodinasi, sehingga tumbuh persamaan persepsi antar para pemangku kepentingan baik pusat maupun di daerah, dan perlunya penguatan-penguatan baik lingkup dinas sosial, maupun para pelaku program penanggulangan kemiskinan lainnya. Menciptakan keberpihakan kelembagaan lokal yang ada di masyarakat untuk menangani permasalahan kemiskinan dan permasalahan sosial di masyarakat.
4. Dinas Sosial perlu menjadi *leading sector* dalam model sinergitas program penanggulangan kemiskinan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi atas masukannya dalam penulisan naskah jurnal ini, terutama kepada nara sumber: Kepala Dinas

Sosial beserta stafnya, staf SKPD dari Dinkes, Diknas, Disdukcapil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bappeda Kota Sukabumi, diucapkan terima kasih kepada Bapak Djamhur (Kabid Sosial Dinsos Kota Sukabumi) dan Bapak Suharma (peneliti STKS Bandung) atas masukan serta yang menjadi rekan dalam pengumpulan data di lapangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, W. (2010), *Kajian tentang "Peran Dinas Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta. Kementerian Sosial. RI
- Dwiyanto, A., dkk, (2003), *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi 2009 - 2013. Dinas Sosial Kota Sukabumi
- Republik Indonesia, (2004). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, RI
- Republik Indonesia, (2011). Undang- undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Jakarta, RI
- Republik Indonesia, (2010). Permendagri No.42 2010 tentang tugas dan fungsi Bappeda dan SK Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan di daerah. Jakarta, RI
- Roebyantho, H., Gati, S, S., Rahman, A. (2011), *Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui Kube*. Jakarta: P3KS Press.

- Soekanto, S. (1991). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suradi, (2011), *Usaha Kesejahteraan Sosial di Era Tonomi Daerah*, Jakarta: P3KS Press.
- Suradi, et.all, (2012). *Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan: “Studi Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak Huni Bagi Keluarga Miskin Perkotaan”*. Jakarta: P3KS press.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta